



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

OPD Dapat Catatan BPK RI

RBI, KEPAHANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang telah mengagendakan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam pengelolaan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kendati Pemkab Kepahiang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa waktu lalu, namun dalam LHP terdapat sejumlah temuan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kepahiang.

Wakil Ketua 1 DPRD

Kepahiang Andrian Defandra, SE mengatakan, LHP BPK RI akan dibahas lebih dulu oleh Panitia Khusus (Pansus) lantaran isinya berupa rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti. "Pansus akan membahas dulu isi LHP berupa catatan dan rekomendasi BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, salah satunya ya pengalihan anggaran pembangunan Masjid Agung," ungkapnya.

Ditambahkan, setelah tuntas membahas LHP dan juga memberikan catatan. Maka Pemkab Kepahiang, akan diberi waktu 60 hari

menindaklanjuti rekomendasi dan catatan BPK RI tersebut. "Pansus punya waktu dua minggu untuk membahas LHP BPK ini, baru kemudian memberikan rekomendasi pada Pemkab untuk menindaklanjutinya," demikian.

Sementara itu, Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Selasa, (11/6) penyampaian nota Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2018 oleh Kepala Daerah. Dalam rapat tersebut Bupati Kepahiang memaparkan

hasil LHP oleh BPK RI tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang setidaknya sudah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan tahun 2018 tersebut. "Meski kita sudah mendapatkan opini WTP bukan berarti tidak ada temuan yang menjadi catatan," sampainya.

Dia mengatakan, setidaknya dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI, dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa temuan. Dari beberapa temuan Pemerintah Daerah Ka-

bupaten Kepahiang sudah menuntaskan dengan melakukan pengembalian ke kas daerah sebelum 15 Mei 2019 lalu. Kendati demikian, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang masih memiliki 1 temuan lagi yang harus dituntaskan dengan tenggat waktu sampai dengan 15 Juli 2019 mendatang. "Saat ini masih dalam proses pengembalian dengan waktu 60 hari setelah LHP dikeluarkan dengan batas waktu hingga 15 Juli mendatang. Yaitu temuan kaitan pembangunan Jalan Talang marto," demikian sampai dia. (Ide)